BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi bisnis yang semakin kompleks dengan adanya dinamisasi global di kawasan Asia seperti MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), dengan ketentuan 70% produk negara ASEAN bebas masuk ke negara ASEAN lainnya.[1] Paradigma *cross border dynamic value-chain* (produksi dinamis melintasi batas negara) menjadi acuan perusahaan untuk bersaing minimal dalam cakupan Asia. Keadaan tersebut menyebabkan persaingan ketat antar pelaku bisnis dalam mencapai tujuan perusahaan berupa orientasi laba.

Eksistensi persaingan perusahaan *go public* dalam pasar bebas, dituntut untuk mempercantik tampilan perusahaan kedalam bentuk laporan keuangan. Keadaan suatu perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai dasar para *stakeholder* (pemaku kepentingan) mengetahui perkembangan kinerja suatu perusahaan. Secara sederhana, kinerja perbankan merupakan suatu gambaran tentang kondisi perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan maupun non keuangan, sebagai cerminan prestasi kerja perbankan. Menurut Kasmir penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, analisis yang utama dengan mengunakan analisis tingkat kesehatan perbankan menggunakan CAMEL

[1] Lily Rusna Fajriah, *ini paket kebijakan ekonomi jilid x, 2016,* (diunduh pada 27 Februari 2016) http://ekbis.sindonews.com/read/1084513/33

yang meliputi aspek: *capital, assets, management, earning* dan *liquidity*. Hasil dari masing-masing aspek akan menghasilkan kondisi suatu bank.

Kinerja perbankan merupakan salah satu penopang sektor keuangan memiliki keterkaitan terhadap kebijakan pemerintah sebagai regulator yang mengawasi perbankan. Menurut berita CNN Indonesia**,** Kalangan perbankan menaruh harapan besar terhadap paket insentif yang dijanjikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

> "Kebijakan yang segera dirilis OJK itu diharapkan dapat mendorong efisiensi bank dari sisi biaya operasional dan risiko kredit macet, serta meningkatkan margin keuntungan. Hal ini tidak seralas dengan fakta di lapangan bahwa secara rata-rata di ASEAN, BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan) bank di Indonesia cukup tinggi"[2]

Kemampuan perbankan dalam mempergunakan sumber dayanya dengan cara yang paling efisien dalam memperoleh pendapatan, akan dinilai positif oleh para investor maupun bersaing dengan perbankan lainnya. Tingkat efisiensi menjadi salah satu kunci keberhasilan (*key success factors*) dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah efektif pada akhir 2015. Salah satu unsur penilain kinerja keuangan yaitu mengamati faktor rentabilitas, menurut Herman Darmawi komponen rentabilitas meliputi: pencapaian ROA, pencapaian ROE, pencapaian NIM, tingkat efisiensi, perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, serta prospek laba operasional.

[2] Elisa Valenta Sari, *Bankir Berharap Banyak dari Paket Insentif OJK*, 2016, (diunduh pada 18 Juni 2016) http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160428152723-78-127294/bankir-berharap-banyak-dari-paket-insentif-ojk/

Permasalahan efisiensi merupakan permasalahan yang dihadapi perbankan beberapa tahun terakhir hal tersebut ditunjukkan dengan nilai BOPO yang cukup tinggi. Merujuk pada data hingga akhir 2015, perbankan secara umum memiliki NIM sebesar 5,39 persen dan BOPO sebesar 81,4 persen, walaupun jika dibandingkan bank negara ASEAN mengantongi BOPO lebih rendah pada kisaran 40-60%. Hal ini dibuktikan dengan data dari infobanknews.com yang mengungkapkan bahwa,

> "Rasio biaya operasional berbanding pendapatan operasional (BOPO) tampak menurun jauh dari 76,16% menjadi 81,62%. Angka tersebut sudah melewati ambang batas BOPO 70-80%. Hal itu menegaskan bahwa tingkat efisiensi bank umum menurun. Kenaikan suku bunga deposito mendorong laju biaya dana *(cost fund)* yang kemudian menyebabkan BOPO makin melambung (memburuk)"[3]

Penurunan level BOPO pada perbankan sangat diharapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dengan tujuan agar perbankan lebih efisien. Sehingga perbankan dapat memiliki marjin keuntungan yang cukup dan tidak lagi memasang bunga kredit yang tinggi di level dua digit. Pemerintah berharap, seluruh sektor kredit hanya memiliki bunga rendah di level satu digit.[4] Sehingga untuk bersaing dengan masyarakat ASEAN perbankan harus mampu melakukan efisiensi terhadap kegiatan operasionalnya. Perkembangan pola bisnis yang sebelumnya berbasis tenaga kerja *(labor based business)* menjadi berbasis pengetahuan *(knowladge based business)* memiliki pengaruh dalam menciptakan kekuatan

[3] Apriyani, *Jurus Sakti Bank Menghadapi Tantangan 2016,* 2016, (diunduh pada 26 Juni 2016) http://infobanknews.com/jurus-sakti-bank-menghadapi-tantangan-2016/

[4] Muliaman Hadad, *Aturan Baru Ojk: Tengah April, Bank Dijanjikan Diskon Besar Jika BOPO & NIM Turun,* 2016 , (diunduh pada 26 juni 2016), http://finansial.bisnis.com/read/20160408/90/536108/aturan-baru-ojk-tengah-april-bank-dijanjikan-diskon-besar-jika-bopo-nim-turun

Brand product yang mampu meningkatkan daya beli produk untuk konsumen jasa keuangan. Hal ini disebabkan merek yang kuat dapat membangun bisnis, karena mampu menghasilkan emosi pelanggan yang kuat.

Nilai merek merupakan bagian dari *intangibe asset* (aset tak berwujud) yang tak banyak diungkapkan dalam laporan keuangan. Bentuk aset tak berwujud inilah yang menjadikan nilainya lebih besar dari aset berwujud. Peryataan Peter Duker menjelaskan bahwa aset yang paling berharga institusi pada abad ke-20 adalah peralatan produksinya, sedangkan aset yang paling berharga ada abad ke-21 adalah pekerja berpengetahuan *(knowledge worker)* dan produktivitasnya.[5]

Penyataan Duker disetujui pada bulan Juni 1999 oleh *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) bersama para peneliti menyepakati bahwa *Intellectual Capital* adalah aset paling penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan dan memenangkan persaingan. Isu modal intelektual yang tergolong baru dalam akuntansi modern menjadi samar pengakuannya dengan aset tak berwujud. Hal ini dilihat dari perlakuannya dirujuk pada *goodwiil* yaitu isi dari pos aset tak berwujud. Akuntansi tradisional tidak dapat menyajikan informasi tentang identifikasi dan pengukuran *intangible* dalam organisasi, khususnya organisasi berbasis pengetahuan. Pembahasan jenis *intangible* hanya seputar: kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, model simulasi, sistem

[5] Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital Konsep dan kajian Empiris*, 2009, (Yogyakarta: Graha Ilmu), P 86

administrasi dan komputer tidak diakui dalam model pelaporan manajemen dan keuangan tradisional.[6]

Selanjutnya dalam praktiknya, beberapa *intangible* tradisional digolongkan berupa kepemilikan merek, paten, goodwill masih jarang dilaporkan dalam laporan keuangan. Fakta bersebrangan, dalam peryataan IAS 38 tentang *intangible asset* melarang pengakuan merek yang diciptakan secara internal, logo, judul publikasi, dan daftar pelanggan *(International Accounting Standart Board, 2004).*

Fenomena IC *(Intellectual Capital)* Di Indonesia mulai berkembang dan sudah mendapat perhatian meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai IC, terbukti dari pernyataan PSAK NO.19 (revisi 2009) yang berisi aktiva atau aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik yang timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat ditransfer atau terpisah dari entitas atau dari hak & kewajiban lainnya.[7]

Keberadaan modal intelektual yang terdapat dalam *intangible asset* tidak dapat disepelekan hal fakta eksistensi brand sebagai aset tidak berwujud tidak setara dengan kekuatan ekonomi di Indonesia menjadi perhatian serius agar perusahaan Indonesia dapat bersaing di era pasar bebas global maupun tingkat ASEAN dalam ajang MEA. Peningkatan Kompetensi merupakan hal

[6] *Ibid.*, P. 3,
[7] PSAK. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, P 19.4

dasar dalam membangun nilai perusahaan yang lebih baik, seperti yang diutarakan oleh Samir Dixit, Managing Director Brand Finance Asia Pacific

> "Nilai tidak berwujud merupakan aset penting bagi Indonesia. Di mana hal ini menjadi penting mengingat komposisi Indonesia terhadap nilai perusahaan tidak sejalan dengan rata-rata global yang dilaporkan oleh persentase yang sangat tinggi dari nilai yang dirahasiakan perusahaan"[8]

Hal serupa dinyatakan oleh Sutan Banuara, Direktur Brand Finance Indonesia pada majalah SWA.

> "hingga tahun 2015 belum ada satu pun perusahaan di Indonesia yang masuk ke dalam peringkat 500 dunia karena nilai merek terkecil yang masuk ke dalam peringkat dunia memiliki nilai minimum US$ 3,1 miliar, sementara nilai merek perusahaan tertinggi di Indonesia baru mencapai US$ 2,2 miliar. Hal ini tidak setara dengan peringkat *Nation Brand* yang dirilis oleh Brand Finance, yang mana *Nation Brand* Indonesia berada di peringkat 28 dunia. Tidak setara pula dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang sudah berada di posisi 16 besar dunia dalam negara-negara G-20"[9]

Modal intelektual dapat di golongkan menjadi *Human capital/* modal manusia, *Structur capital/* modal organisasi, *Customer capital/* modal pelanggan. Unsur yang paling kompleks adalah Human Capital sebagai komponen yang mampu mengelola kinerja keuangan dalam bidang manajeman SDM (Sumber Daya Manusia), Permasalahan selanjutnya menghadapi generasi milenial (Gen Y yang lahir di era 1980-an hingga pergantian milenium).

Di samping itu, terdapat isu manajemen keberagaman karyawan, pengembangan desain organisasi baru, hingga semakin masifnya penggunaan

---

[8] http://ekbis.sindonews.com/read/811597/32/brand-finance-umumkan-10-brand-indonesia-paling-bernilai-1385722043 diunduh pada 16 Februari 2016

[9] Sutan Banuara. *Mengelola Aset Paling Berharga*, 2015, http://swamagazine.blogspot.co.id/2015/09 diunduh pada 15 Februari 2016

teknologi konsumer (seperti *smartphone* dan *mobile app*) pada media sosial sebagai penunjang manajemen SDM perusahaan. Menurut Irvandi Ferizal, Ketua Umum Perhimpunan Manajemen Sumber daya Manusia Indonesia, mengistilahkannya zaman VUCA, yakni era yang penuh dengan *volatility, uncertainty, complexity,* dan *ambiguit*".[10] Laporan inilah yang harus ditanggapi pihak perusahaan agar mengikuti perkembangan zaman terutama pada zaman VUCA sebagai pengemban modal manusia, modal struktur dan modal fisik yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Adapun hasil penenilitian dalam modal intelektual sudah banyak dilakukan peneliti dalam negeri maupun luar negeri yaitu: Chen *et al.* (2005), Ceicilia Bintang *et al*. (2011), Nora Riyanti *et al*. (2012), Muhammad Abdul majid makki *et al*. (2014), I Wayan Gede Setia Pratama *et al*. (2015) mengungkapkan efektifitas *intellectual capital* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan dengan proksi produktivitas dan profitabilitas.

Namun terdapat hasil penelitian yang masih kontradiktif seperti: Setyarini Santoso (2012) Modal intelektual dan pengungkapannya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada indeks LQ-45, baik kinerja yang menggunakan *accounting-based performance* maupun *market-based performance*, baik pada saat ini maupun satu tahun yang akan datang. Gilang Anis *et al.* (2015) Tidak adanya pengaruh mediasi antara kinerja

[10] Joko Sugiarsono, *10 Isu Stategis dalam Managemen SDM*, 2016, http://swa.co.id/business-strategy/ diunduh pada 15 Februari 2016

modal intelektual terhadap pengungkapan modal intelektual melalui kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh G.Bharathi Kamath (2015) melakukan penelitian pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan dan penilaian pasar yang menunjukkan bahwa komponen modal intelektual (modal manusia, modal struktural dan modal karyawan) tidak ada berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Salah satu hambatannya adalah belum ada kejelasan untuk mengungkapankan modal intelektual dalam laporang keuangan perusahaan. Pengukuran yang tepat akan modal tak berwujud ini belum dapat ditetapkan.[11] Inilah yang menyebabkan belum seragamnya pengakuan yang dilakukan perusahaan terhadap modal intelektual.

Melanjutkan permasalahan kinerja keuangan yaitu tata kelola perusahaan atau *corporate governance.* perspektif *stakeholders* mengungkapkan bahwa *corporate governance* adalah perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang saham internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu sistem yang mengendalikan (*Forum for Corporate Governance*, 2002).

Pengungkapan *Good Corporate Governance* menjadi suatu keharusan bagi PT (Perseroan Terbatas) yang telah *go public* atau bergabung dalam bursa sebab *Good Corporate Governance* dapat menentukan kredibilitas perusahaan di mata semua *stakeholders.* Kata "perseroan" menunjuk pada

[11] Ihyaul Ulum, *op. Cit.,*. P. 72

modalnya yang terdiri dari sero (saham), sedangkan kata "terbatas" menunjuk pada tanggung jawab pemagang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Sebab terdapat beberapa kesenjangan kepentingan antara pihak para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus selaku manajeman yang bertindak sebagai agen (pengambil keputusan). Kepentingan pemilik perusahaan adalah mendapatkan *return* yang maksimal terhadap dana yang diinvestasikan, sedangkan pihak manajeman memiliki kepentingan terhadap perolehan *incentives* atas pengelolaan dana milik perusahaan.

Konflik kepentingan ini menimbulkan biaya yang muncul dari ketidaksempurnaan penyususnan kontrak antara *agents* (manajemen) dengan *principals* (pemegang saham) karena adanya informasi asimetris. Dalam tata kelola perusahaan, harus mampu meminimalisir konflik kepentingan yang secara alamiah terjadi antara kepemilikan perusahaan *(ownership structure)* yang terdiri dari dua tipe struktur kepemilikan tersebar *(dispresed ownership)* seperti, *outside investor* (para pemegang saham publik) dan struktur kepemilikan pengendalian *(control)* pada segelintir pemegang saham saja *(concentrared ownership)*[12]. Ketika struktur kepemilikan perseroan tersebar kepada *outsider investors* dengan pihak direksi yang juga memiliki saham perusahaan yang bersangkutan.

[12] Indra surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governace Mengesampingkah Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha,* 2006 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group) P. 3

Contoh nyata pada perusahaan Indonesia secara historis dan sosiologi adalah perusahaan – perusahaan Indonesia dimiliki atau dikontrol keluarga. Meskipun perusahaan tersebut telah tumbuh menjadi perusahaan *public*, namun kendali pihak *ownership* atau keluarga masih begitu signifikan. Kondisi ini menyebabkan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, *outsider investors* atau pemegang saham minoritas tidak memiliki informasi tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Suatu survei penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) oleh *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA pada perusahaan publik di Indonesia hanya direspon dari 10% dari total 332 perusahaan. Hanya 31 perusahaan yang mengikuti survei tersebut. Survei serupa yang dilakukan di negara-negara maju rata-rata diikuti lebih dari 70% reponden. Kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corpotate Governance)*.

> "Ajang *Asean Capital Markets Forum* (ACMF) telah digelar di Manila,menempatkan praktik *Corporate Governance* emiten di Indonesia tertinggal dibanding Thailand yang berhasil menempatkan 23 emiten, Singapura 8, Filipina 11, Malaysia 6 emiten. Indonesia hanya mengalahkan Vietnam yang belum satupun emitennya masuk dalam daftar 50 emiten ASEAN dengan praktik *Corporate Governance* terbaik."[13]

[13] Mashud Toarik, *Dua Dimensi ini Penghambat Praktik CG Emiten Indonesia*, 2015, http://www.beritasatu.com/pasar-modal/328825-dua-dimensi-ini-penghambat-praktik-cg-emiten-indonesia.html diunduh pada 15 Februari 2016

Berdasarkan data tersebut wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Theo Lekatompessy menilai beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan praktik Corporate Governance atau GC perusahaan di Indonesia, Terdapat dua dimesi yang yaitu pertama *The ability of the player to comply with the regulation* dan dimesi kedua adalah *The willingness of the player to comply with the regulation*.[14] Dimensi pertama kondisi emiten di Indonesia sangat jauh *gap*-nya. Misalnya kelasnya perusahaan Astra begitu besar dimana tidak ada masalah mengikuti peraturan yang berkembang, sebaliknya dengan perusahaan kecil baru dan berkaitan dengan komoditi yang sangat terpengaruh dengan aturan dan siklus pasar sulit untuk mengikuti aturan.

Sebuah komite khusus menyusun *Indonesian Code of Good Corporate Governance* yang menjadi prinsip-prinsip tetang pengelolaan perusahaan yang baik. Sebagai sebuah pedoman yang dapat dijadikan tolak ukur untuk memformulasikan ketentuan hukum yang mengandung pelaksanaan dari prinsip tersebut. Sayangnya, keberadaan pedoman ini nyatanya belum membawa perubahan besar karena masih terdapat kasus pembekuan Bank Global, tender Indomobil, Divestasi BCA, pembekuan Bank Global, Bank Century maupun kasus ‘papa minta saham’ divestasi (penjualan dari bisnis perusahaan dengan motif mencari keuntungan) pada kasus freeport Indonesia hanya mendivestasikan 20,64 persen saham kepada pihak nasional karena saat ini pemerintah telah mengontrol 9,36 persen saham Freeport. Freeport

[14] Mashud Toarik, *Loc. cit.*

mematok harga 10,64 persen saham senilai 1,7 miliar dollar AS.[15] Namun pada tahun 2015 terjadi kasus ketua DPR Setya Novanto (Setnov) memalak 20 persen saham perseroan dan meminta jatah 49 persen saham proyek[16].

Para pelaku bisnis para pelaku bisnis masih belum serius menerapkan *Good Corporate Governance*. Kondisi ketidak seriusan penerapan *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu: ketaatan, lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, dan peranan dari *Stakeholder*[17]. Konsep awal *Corporate Governance* yang menghendaki perusahaan mampu lebih akuntabel dan transparan kepada *stakeholders.* Walaupun dalam jangka pendek penerapan *Corporate Governance* dilihat kurang ekonomi. Namun dalam jangka panjang dapat berdampak baik.

Adapun hasil penelitian yang menjadikan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu *Good Corporate Governance* yang di proksikan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen oleh Aini (2011), Cornet (2006) Rawi dan Muchlish (2010) menguarakan hasil yang positif, karena tingkat monitor lebih efektif. Namun terdapat hasil yang tidak sependapat atau kontradiktif dengan peneliti lainnya yaitu : Ceicilia Bintang *et al*. (2011), Nora Riyanti *et al*. (2012), Muhammad Abdul majid makki *et al*. (2014), I Wayan Gede Setia Pratama *et al*. (2015) mengungkapkan penerapan *Good Corporate Governance* tidak

[15] Ferdi hasiman, *Divestasi Saham Freeport, Op.cit* , P.1

[16]Reynaldo Giffari. *Kronologis Lengkap Kasus Papa Minta Saham.*2015. http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html (diunduh pada 01 Maret 2016)

[17] Indra surya dan Ivan Yustiavandana, *op.cit.*, P. 60

berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, sedangkan Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA namun kearah negatif.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan serta hasil penelitian yang telah ada memotivasi peneliti untuk melanjutkan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ***Pengaruh Modal Intelektual dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Tahun 2015***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi rendahnya kinerja keuangan perusahan sebagai berikut:

1. Menurunnya tingakat efisiensi perbankan.
2. Rendahnya nilai brand *(intangible asset)* perusahaan.
3. Belum adanya standar baku konsep pengukuran modal intelektual
4. Rendahnya pelaporan *good corporate governance.*
5. Terdapat kesenjangan kepentingan antara pihak para pemegang saham pihak manajemen dalam praktik tata kelola perusahaan.
6. Terdapat praktik penyimpangan (KKN) dalam pengelolaan perusahaan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ingin meneliti pengaruh modal intelektual dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan perusahaan yang dilakukan kepada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Kinerja Keuangan yang diteliti adalah rentabilitas dengan menggunakan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan Modal intelektual diukur dari *value added intellectual capital* (VAIC^{TM}) yang diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. *Good Corporate Governance* diukur dari *self assesment* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Pembatasan ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Perbankan?
2. Apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Modal Intelektual, *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan perbankan?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut,

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh. selain itu, sebagai sarana pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti khususnya mengenai penerapan teori akuntansi menejemen. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan mahasiswa yang tertarik membahas topik mengenai kinerja keuangan, modal intelektul serta tata kelola perusahaan

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi empiris mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi perusahaan dalam mengelola aset tidak berwujud dan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi perusahaan agar terus memperbaiki dan melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan menilai posisi perusahaan dalam lingkup ASEAN.